

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asmawarati, Tina, 2014, *Sosiologi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1998, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV, Cakrawala Media*, Yogyakarta.
- Qamar, Nurul, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Social Politic Genius (SIGn), Cetakan Pertama, Makassar.
- S Arliman, Laurensius, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Cetakan Pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Salam, Safrin dkk, 2020, *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*, Zifatama Jawara, Sidoarjo.
- Salsa, Shidqi Noer, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta.
- Ujan, Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum Kanisius*, Kanisius, Yogyakarta.
- Zed, Mestika, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

### B. Internet

- Budiono, Herlien, "Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d89c363be3a9/peran--fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-oleh--herlien-budiono?page4>, diakses pada tanggal 26 Juli 2020 pada pukul 09.45

Kamus Besar Bahasa Indonesia “Delegasi” <https://kbbi.web.id/delegasi>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pada pukul 19.20.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Notaris” <https://kbbi.web.id/notaris>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 pada pukul 13.25

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Responden” <https://kbbi.web.id/responden>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 pada pukul 19.20

### **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Adhiyaksa, Ogie Chaniago Yoga, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polisi” *Tesis*, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Maysaroh, Layla, “Upaya Keberatan Notaris Terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Atas Disetujuinya Permintaan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Proses Peradilan”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Ruman, Yustinus Suhardi, “Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan”, *Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2012.

Rumzen, Azalia Meyti Ratnasari, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Persetujuan Terhadap Notaris Yang Dipanggil Oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim Untuk Kepentingan Proses Peradilan”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No.3, 2016.

Sumiarti Endah, Djodi Suranto & Yennie K Milono, “Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dalam Prespektif Perlindungan Jabatan Notaris dan Kepentingan Umum”, *Pakuan Law Review*, Vol. 1, No.2, 2015.

Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth Tijow, 2020, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Wardio, Didit, & Lathifah Hanim, “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman”, *Jurnal Akta*, Semarang, 2018.

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.